

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak pulau dan suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Desakan atas keperluan daerah di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat salah satu faktornya yaitu dikarenakan bertambahnya penduduk di tiap daerah. Adanya faktor bertambahnya penduduk membuat pemerintah daerah harus membuat strategi dalam pengelolaan keuangan daerahnya agar bisa memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pembiayaan rencana keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi untuk satu tahun anggaran merupakan fungsi dari adanya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Setiap daerah menurut asas desentralisasi memiliki hak untuk memungut pajak atau retribusi dan mengolah sumber dayanya secara mandiri. Sumber dana daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan pinjaman daerah, dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Tiga sumber pertama dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan sisanya dikelola oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah. (Halim, 2008)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah bentuk penyusunan anggaran rincian yang dibuat secara sistematis dan berisi anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. APBD dapat memiliki arti sebagai strategi keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. PP Nomor 58 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

adalah strategi keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pembangunan ekonomi pada suatu daerah merupakan salah satu tantangan bagi suatu pemerintahan daerah dan masyarakat bersama-sama untuk mencapai dan menjalankan apa yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan dengan baik sehingga dapat mencapai segala sesuatu yang sudah ditargetkan (Siwu, 2017). Kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang baik dapat menjadikan suatu daerah mudah dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

Terdapat peraturan mengenai pemberlakuan tentang otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan pemerintah daerah bisa lebih efektif dalam mengurus potensi yang bisa digali terkait penerimaan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Kemampuan pemerintah dalam menggali potensi sumberdaya juga mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat menjadi serendah mungkin. Semakin besar tingkat kemandirian pada suatu daerah, maka semakin terlihat kemampuan dalam membiayai kebutuhannya tanpa bantuan dari pemerintah pusat (Landiyanto, 2005) dan mempercepat pembangunan daerah untuk mensejahterahkan masyarakatnya

Terbitnya UU 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan setiap wilayah sebuah otonomi atau kewenangan untuk mengurus dalam negerinya sendiri tetapi tidak semua wewenang diambil alih oleh pemerintah daerah (Said, 2015). Adanya kewenangan untuk mengatur keuangan merupakan kelemahan dari pihak otoritas untuk mengelola keuangannya sendiri.

Apabila Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dan memiliki hak untuk mengambil keputusan belanja di sektor publik, maka harus mendapat dukungan keuangan yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah otonom yang mana terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu terdiri dari :
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan public. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kuantitas yang berbeda-beda untuk tiap daerah dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Daerah yang paling maju di bidang industri otomatis akan memiliki nilai PAD yang tinggi begitu pula sebaliknya. Terjadi ketimpangan dan ketidakadilan antar daerah di Indonesia, ada daerah yang memiliki PAD tinggi serta PAD rendah yang menyebabkan kondisi perekonomian di Indonesia tidak merata.

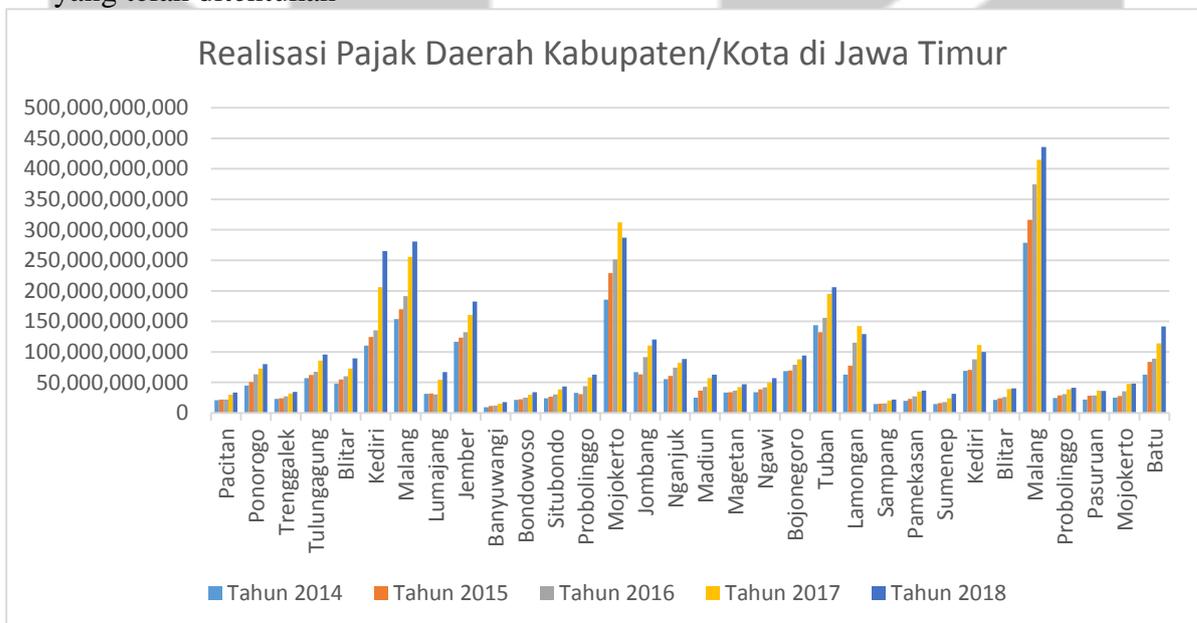
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua hal yang sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah (Kementerian Keuangan RI, 2018). Pajak daerah mempunyai pengertian yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah terutang bagi orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pada keadaan khusus yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur karena merupakan salah satu Provinsi terbesar di Pulau Jawa. Memiliki 29 kabupaten dan 9 kota menjadikan Provinsi Jawa Timur memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya.

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia dan Surabaya menjadi ibukota. Jawa Timur dibagi menjadi 4 Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil, yaitu Bakorwil 1 Madiun, Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang, dan Bakorwil IV Pamekasan. Sumber perkonomian Jawa Timur berasal dari berbagai sektor mulai dari perikanan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda sehingga terjadi kesenjangan pada masing-masing wilayah. Akibat adanya kesenjangan antar daerah menyebabkan suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Muhtarom, 2017). Daerah perkotaan lebih

maju dan cepat perkembangannya terutama di Surabaya dan Malang Raya. Terjadi perbedaan kesenjangan ekonomi antara kemiskinan di pedesaan sebesar 15,2% tetapi kemiskinan di kota sebesar 6,97% (Ardianto, 2019)

Gambar 1,1 berisikan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan kondisi fluktuatif di setiap tahunnya. Hal itu memperlihatkan salah satu indikator bahwa Kabupaten/Kota Jawa Timur mempunyai kebijakan strateginya masing-masing untuk mencapai target pajak yang telah ditentukan



Sumber : data diolah, Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Gambar 1. 1

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2014 – 2018**

Kenaikan PDRB tidak lepas dari efek kenaikan aktivitas ekonomi dan kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan efek dari meningkatnya pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat. Besar kecilnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk.

Jika penduduk mengalami kenaikan, maka pendapatan daerah yang dapat ditarik oleh pemerintah juga meningkat (Atmaja, 2011). Apabila jumlah penduduk mengalami kenaikan maka akan berdampak positif dalam jangka waktu tertentu dan meningkatkan penerimaan pajak daerah

Adanya kenaikan jumlah penduduk harus diimbangi dengan ketersediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri. Kondisi pada saat permintaan tinggi tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan barang dan jasa, maka akan menyebabkan inflasi (Sari, 2019). Inflasi dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan membayar pajak serta menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi dan menjaga agar tingkat inflasi berada di titik rendah sehingga penerimaan pajak daerah dapat maksimal selain itu laju pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan maksimal

Kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi di masa mendatang. Pemerintah daerah dapat menerapkan strategi kebijakan yang efektif serta efisien agar penerimaan pajak daerah setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat terus menerus meningkat dan maksimal. Hal tersebut yang melatar belakangi penelitian ini mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur”

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti hanya mengenai jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur . Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
2. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan kegunaan kepada banyak sektor, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya terutama pada bidang perpajakan

2. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat terutama bagi wajib pajak akan pentingnya untuk taat dalam membayar pajak terutama pajak daerah karena berguna bagi kepentingan banyak orang

3. Bagi pemerintah

Bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah dan Badan Pendapatan Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk merumuskan kebijakan strategis dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga mendukung penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang menguraikan rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan. Bagian analisis data berisikan tentang pengujian data penelitian yang telah dilakukan kemudian dijelaskan dalam sub bab pembahasan mengenai hasil yang didapatkan dari pengujian tersebut

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya